

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, dalam Oetoyo Oesman dan Afian (ed) *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992.
- A. Hasjimy, *Dimana Letak Negara Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- A.V. Dicey, diterjemahkan Nurhadi M.A., *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Abul A'la Al-Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet I, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Adnan Buyung Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosial Legal atas Konstituante 1956-1959*. Grafiti, Jakarta. 1995.
- Afan Gaffar, *Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dimasa Yang Akan Datang*. Materi Pelatihan Eksekutif Pertamina "Manajemen Perubahan Menuju Perusahaan Kelas Dunia", Jakarta, 1999.
- Agus Haryadi, *Bikameral Setengah Hati*, dalam Bambang Widjojanto, Saldi Isra dan Marwan Mas (Edit.), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan dan Koalisi untuk Konstitusi Baru, Jakarta, 2002.
- Agus Sutiono dan Ambar TS, *Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik di Indonesia, Dalam Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Editor, Teguh Sulistiyani, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Ahmad Sukarya, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Akira Nagazumi. *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Yayasan Obor Jakarta, 1980.
- Aimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

- Arthur McEwan, *Neoliberalism or Democracy: Economic Strategy, Markets, and Alternatives for the 21th Century*, Zed Books, London, 1999.
- Azhary, *Ilmu Negara, Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Azumlia Rifai, *Pengantar Konstitusi Australia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- B.N Marbun, *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- _____, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fak.HUII, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993.
- _____, *Empat Tulisan tentang Hukum Program Pasca sarjana BKU Hukum Ketatanegaraan*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995 Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dalam Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , UII Press, Yogyakarta.
- _____, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat NASIONAL kKASGORO, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000.
- Bambang Yudoyono, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Tasrif Watampone, Jakarta, 2001.
- Bellefroid dalam N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, 2009.
- Benny K. Herman, *Konstitualisme Peran DPR dan Judial Review*, YLBHI, Jakarta, 1991.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- David Potter, etc. *Democraton*. Open University, Cambridge, 1997.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Dona Batten (Project Editor). *Gale Encyclopedia of American Law*, 3RD Edition, Volume 14, Dictionary Legal. 2010.

- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajahmada Universiti Press, Yogyakarta. 2005.
- E. Huber, dan JD. Stephens, *Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Politics in Global Market*, The University of Chicago Press, 2001.
- Friedrich A. Hayek, *The Road to Serfdom*, (Chicago: University of Chicago Press, 1944); dan Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press, Chicago, 1962.
- George R.Terry, *Asas-asas Manajemen*, diterjemahkan oleh Winardi, Alumni, Bandung, dan dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ibid*, 1986.
- H. Mustamin DG. Matutu, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Hanif Nur cholis, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa, Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961.
- Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2003.
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- HM Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- I Ketut Suardita, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Menetapkan Pajak daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004*, 2009.
- Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokan dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- J.D. Ny. Hart, *The Role of Law in Economic Development*, dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam pembangunan Ekonomik*, Jilid 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

- J.J.Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1954.
- Jason L Finkle dan Richard W Gable, *Political Development and Social Change*, Wiley and Sons. Inc, 1971.
- Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka Publisher. 2008.
- Jenedjri M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Prolema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, UII Press, Yogyakarta, t.t.
- Khwan Abidin Basri, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Lyman Tower Sargent. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer; Sebuah Analisis Kontemporer*. Erlangga, Jakarta, 1987.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Medan, 1988.
- M. Umer Chapra, "Negara Kesejahteraan Islami dan Peranannya Di Bidang Ekonomi," dalam Ainur Rofiq, ed., *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1997.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, dengan judul asli buku "*Islam and the Economic Challenge*", Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (2) (Proses Dan Teknik Penyusunan)*, Kansius, Yogyakarta, 2007.
- Maswadi Rauf, *Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, 1997.
- Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.7, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1988.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- _____, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pratun di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapandja, Jakarta, 1959.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- N Barr, *The Economics of the Welfare State*, Stanford: Stanford University Press, 1998.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke II, Nusa Media, Bandung, 2010.
- P. Manow, *The Good, the Bad, and the Ugly: Esping-Andersen's Regime Typology and the Religious Roots of the Western Welfare State*, Max Planck Institute, 2004.
- Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta, 1989.
- Paulus Efendi Lotulung, *Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi Dalam Buku Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Bahan Penataran Hukum Administrasi tahun 1997/1998 Fakultas Hukum Universita Airlangga*, Surabaya, 1998.
- Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Poggi, Gianfranco, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*. Standford University Press, California, 1992.
- Prasetijo. *Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance*. Total Media. Jakarta, 2009.
- R. William Liddle. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*. Grafiti Jakarta, 1992.
- Ramdlon Nanong, *Gatra Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Ramlam Surbakti, *Menuju Demokrasi Konstitusional: Reformasi Hubungan dan Distribusi Kekuasaan*, dalam Maruto MD & Anwari WMK (Edit.), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat*, LP3ES, Jakarta, 2002.

- Ramlan Surbakti. *Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah Menurut UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004*. Surabaya, 1999.
- RE, Goodin, *Reason for Welfare: The Political Theory of the Welfare State, Studies in Moral, Political, and Legal Philosophy*, Princenton University Press, 1988.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Robert A. Dahl. *Analisa Politik Modern*. Gramedia, Jakarta, 1982.
- Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, dalam T. Hani Handoko, Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 1991.
- Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, Basic Books, New York, 1974.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ryaas Rasyid. *Kebijakan Otonomi Daerah dan Peran DPRD*. Dalam Panduan Parlemen Indonesia. Yayasan API, Jakarta, 2000.
- S.F.Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press Jogjakarta, 2004.
- Sadjijono, *Memahami, Beberapa Bab Pokok Hukum Aadmistrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008.
- Sadu Wasistiono, *Membangun Hubungan Kerja Antara Badan Eksekutif Daerah dengan Badan Legislatif Daerah*. Dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting). *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2002.
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sarundang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LPKN, Jakarta, 2000.
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet.II. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.
- Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Sir William O, Hart – J.F. Garner, *Introduction To The Law of The Local Government and Administration*, Butterworths, London. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, 1995, dalam, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1973.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberti, Yogyakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sondang P. Siagian, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- Sri Soemantri M, *Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Almuni, Bandung, 1992.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitution: An Introduction To The Comparative Study Of History And Existing From*, Sidwick And Jackson. London. 1975.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Suhino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sukarna. *Sistem Politik*. Alumni, Bandung, 1981.
- Syahrono Oman, *Manajemen Kekuatan Sosial Politik di Daerah*, Materi Diklat Manajemen Strategis bagi Bupati dan Wakilnya serta Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia, Badan Diklat Depdagri, Jakarta, 2001.
- T.H. Stevenson, *Politics and Government*. New Jersey: Littlefied, Adam and Co, 1973.
- Thoha Miftha, *Kelembagaan Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik*, Materi Diklat “Manajemen Strategis bagi Bupati dan Wakilnya serta Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia”, Badan Diklat Depdagri, Jakarta, 2001.
- Thoha, Miftah, *Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik*. PPs UGM, Yogyakarta, 2000.
- Thomas R. Dye-L. Harmon Zaiger. *The Irony of Democracy*. 1984.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Pblisher, Jakarta, 2010.
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bima Aksara, Jakarta, 1989.

- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.
- Wantu, Sastro M., *Memperkuat Fungsi Legislasi DPRD Sebagai Format Policy Dalam Euforia Otonomi Daerah, Jurnal Legalitas Universitas Gorontalo*, Vol. 05, No. 01, 2012.
- Wasistiono, Sadu, *Pasang Surut Otonomi Daerah-Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Yayasan Tifa, Jakarta, 2008.
- Widodo Ekathahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2008.
- William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition, Van Nostrand Company, New Jersey, 1968.
- Yahya Muhaimin dan Colin MacAndrews, ed. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, UGM Press, Yogyakarta, 1988.
- Yasminingrum, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, FH Untag Semarang, 2010.

B. Perundang-Undangan

Al-Qur'an.

Hadist.

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang *Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.*

Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tentang *Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia*

Tap MPR No. II/MPR/1973 tentang *Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI*

Tap MPR No. VI/MPR/1999 tentang *Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.*

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang *Perubahan Ketiga dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang *Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah*

C. Artikel Ilmiah (Jurnal/Makalah)

Article II Section Four Konstitusi Amerika Serikat.

Bambang Cipto. *Revolusi Partisipasi” dan Masa Depan Partai Politik Indonesia.* Dalam majalah kajian ekonomi dan social *Prisma* 8. LP3ES, Jakarta, 1999.

Bambang Yudhoyono, *Op Cit, Good governance & Pelayanan Aspirasi Politik DPRD.* Dalam Jurnal PSPR Edisi I, Pebruari 2002.

Edi, *Negara Kesejahteraan dan Reniventing Depsos.*

Hamid Awaludin, *Eksekutif v.s. Legislatif dalam Perspektif Etika Pemerintahan,* dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting).

- Harry Puguh Sosiawan, *Telaah Tentang Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial (Pandangan 6 Fraksi MPR Dalam Proses Amandemen Ke-4 Pasal 34 UUD'45)*, Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta: 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
- Khaerul H. Tanjung, *Membangun Lembaga Legislatif yang Aspiratif dsan Beribawa dengan Prinsip Good Governance. Makalah*, Disampaikan pada seminar tentang Desiminasi Policy Paper, oleh Komisi Hukum Nasional, Medan, 1-2 Oktober 2003.
- M. Ryaas Rasyid, *Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan teoretik)*, dalam *Jurnal Ilmu Politik 17*, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- M. Solly Lubis, *"Fungsi Anggota DPRD Sebagai Legislator"*, Makalah, Disajikan pada Acara Pelatihan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Penyabungan, MADINA, 5 Oktober 2002.
- Mohhammad Taufiqurrahman, *"Undang-Undang Pemilu yang baru suatu Perbandingan,"* Skripsi Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1985.
- Muryanto Amin. *Konsep Negara Kesejahteraan Dari Waktu Kewaktu*. Jurnal POLITEIA| Vol.3|No. 2|Juli 2011. ISSN: 0216-9290.
- Nazarudin Sjamsuddin. *Negara dan Politik dalam Islam*, 1996.
- Ni'matul Huda, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Era Otonomi Luas." Dalam jurnal ilmu-ilmu social *UNISIA* Nomor 51/XXVII/I/2004, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Januari-Maret 2004, hal. 62-63.
- Orasi Ilmiah Pelepasan Fakultas Hukum di Hotel Karlita Tegal, oleh DR. Abdul Aziz, SH.MHum., dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Hubungan Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Makalah ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara, (Jakarta, 30 Oktober 2008), hal. 2.
- Pudji Astuti. *Pandangan Empirik Mengenai Hubungan Legislatif-Eksekutif di Daerah Kota Semarang*, dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting).
- Sadu Wasistiono, dalam Sadu Waasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting).

- Saldi Isra, 2001, *Pemilihan Presiden Langsung*, dalam *Kompas* 24 September, Jakarta. Baca juga Saldi Isra, 2002, *Perkembangan Pengisian jabatan Presiden di Bawah Undang-Undang Dasar 1945*, dalam *Jurnal Legality*, Vol. 10, No. 1, Februari-Agustus, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Saldi Isra, 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi: Memastikan Arah Reformasi Konstitusi*, dalam *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, Nomor 2, Jakarta. Baca juga Saldi Isra, 2002, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Jurnal Respublika*, Vol.2, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau-Pekanbaru.
- Semil, Nurmah. *Servis Quality. (Servqual). Pelayanan Publik Instansi Pemerintah dan The New Public Service*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)* Vo. 5 No. 1, Januari 2005.
- Umar Juoro, “*Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi*”, dalam *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol.2, Juni-september 2002, hal. 7.

D. Majalah/Koran

- Adnan Buyung Nasution, et.al. *Federalisme untuk Indonesia*. Kompas 1999. terutama pada topic Pengalaman Negara-Negara ASEAN Dalam Federalisme oleh Syamsumar Dam.
- Anajeng, *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kota Surakarta dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 2014. diakses di <http://lutpimajidi.blogspot.co.id/2014/10/penguatan-fungsi-legislasi-dprd-dalam.html>.
- Bismar Nasution, *Memoles Hukum Mengundang Investasi*, *Harian Medan Binis*, 5 Juni 2004.
- Bernhard May dan Gabe Ferrazzi. *Arsitektur Pembagian Urusan Pemerintah: Kebutuhan Pembentukan Konstitusional dan Legislatif*, dalam bulletin *Inovasi CLGI* Tahun III No. I, Jakarta: YIPD/CLGI, Januari-Maret 2004.
- Dilemma Demokrasi Pluralis, Antara Otonomi dan Kontrol*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Jateng Pos 17 Desember 2012
- Loenard J. Theberge, “*Law and Economic Development*”, dalam Bismar Nasution, “*Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia*”, *Majalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 8, Nomor 1, Pebruari 2003.
- Kompas*, 22/02-2001.

Saldi Isra, *Haruskan Presiden Orang Indonesia Asli*, dalam *Koran Tempo*, 21 Mei, Jakarta, 2003.

Saldi Isra, *Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat*, dalam *Kompas* 02 September, Jakarta, 2002.

E. Internet:

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. *Statistik Daerah Kota Semarang 2014*.

Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reniventing Depsos*, artikel diakses pada 6 September 2008 dari <http://209.85.175.104/search?q=cache:gBIPSii64oJ:www.depsos.go.id/>

Harry Kusuma, S.IP. <http://harryuban.blogspot.co.id/2014/12/review-uu-no-23-tahun-2014-tentang.html>. Lihat Naskah akademik RUU Pemda, 2011.

Saldi Isra, *Lembaga Legislatif Pasca-Amandemen UUD 1945*, sumbangan tulisan untuk satu tahun wafatnya Prof Suwoto Mulyosudarmo, 2003, Tersedia di https://www.saldiisra.web.id/Amandemen_Lembaga_Legislatif_dan_Eksekutif:_Prospek_dan_Tantangan, 2010.

Wahyu Priyono, SE, MM, *Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah*, <https://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/>

<http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/01/sistem-pemerintahan-singapura-artikel.html>

<http://hutagaoltrisna.blogspot.co.id/2014/12/sistem-pemerintahan-thailand.html>.

<http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal> karya Mulyana massmoel.

<http://nasional.republika.co.id>, dan terbitnya berita online ini pada tanggal 16 oktober 2014.

<http://setabasri01.blogspot.co.id/2012/05/bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan11.html>

<http://setabasri01.blogspot.co.id/2012/05/bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan11.html>

<http://www.hukumpedia.com/twtho/pembagian-urusan-pemerintahan-menurut-undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah>

<http://www.informasiahli.com/2015/10/sistem-pemerintahan-malaysia.html>.

<http://www.jpnn.com/read/2014/03/19/222922/Dilapori-Ada-114-Kasus,-Bupati-Enthus-Mengaku-Hampir-Semaput>

<http://www.kompasiana.com/khun/7-alasan-ahok-menolak-kepala-daerah-dipilih-dprd>

<http://www.kompasiana.com/pradhabasu/kritik-terhadap-uu-no-32-tahun-2004>.

<http://www.lin.go.id/new.asp?kode=240902POLT0003>

<http://www.parliament.uk/factsheets>, *Undang-Undang Susduk: Pintu Masuk Penguatan Lembaga Perwakilan*.

<http://www.semarang.go.id/>

<https://mapunsoed12.files.wordpress.com/.../makalah-patologi-birokrasi>

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/33-amande-men-lembaga-legislatif-dan-eksekutif-prospek-dan-tantangan.html>. 2010.

Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes.

Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik 2014.

Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik 2014.

Kabupaten Tegal Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal.

Kelley. D, "*Altruism and Capitalism*" {Artikel online}, 1994, tersedia di: www.objectivist-center.org/text/dkelley_altruism-capitalism.asp.

Kota Tegal dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kota Tegal. hal. 3-15.